



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA BIKA KECAMATAN BIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Kecamatan Bika;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BIKA KECAMATAN BIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditetapkan dan disahkan Batas Wilayah Desa Bika Kecamatan Bika.

### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bika Kecamatan Bika berdasarkan:
- a. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Nomor 140/18/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/15/PEMDES/NM/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Nomor 140/110/ PEMDES-BK/2017, Nomor 140/79/PEMDES-NM/2017;
  - b. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Jelemuk Kecamatan Bika Nomor 140/19/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/20/PEMDES-JLK/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika Nomor 140/113/ PEMDES-BK/2017, Nomor 140/84/PEMDES-JLK/2017;
  - c. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Nomor 140/20/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/15/PEMDES-JKM/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Nomor 140/109/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/75/ PEMDES-JKM /2017;
  - d. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Nomor 140/21/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/22/PEMDES-BH/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Nomor 140/108/ PEMDES-BK/2017, Nomor 140/131/PEMDES-BH/2017;
  - e. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Penyeluang Kecamatan Bika Nomor 140/22/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/15/PEMDES-P/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Nomor 140/111/ PEMDES-BK/2017, Nomor 140/70/PEMDES-P/2017; dan
  - f. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika dan Kepala Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Nomor

6 Tahun 2016, Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Nomor 140/112/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/26/PEMDES/2017.

- (2) Batas Wilayah Desa Bika Kecamatan Bika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. batas utara Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara;
  - b. batas barat Desa Nanga Manday dan Penyeluang Kecamatan Bika;
  - c. batas timur Desa Bika Hulu Kecamatan Bika; dan
  - d. batas selatan Desa Jelemuk dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Kecamatan Bika yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 6


Peta Batas Desa Bika Kecamatan Bika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 27 November 2017

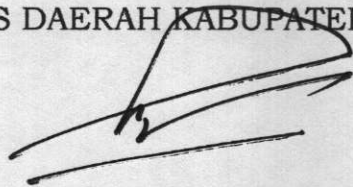
BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017  
NOMOR 71

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 71 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BIKA KECAMATAN  
 BIKA


TITIK KOORDINAT BATAS DESA BIKA KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KAYU SEMPETIR	BIKA - NANGA MANDAY - PENYELUANG - JANGKANG	0° 50' 28.91" N	112° 46' 55.11" E
2	KAYU GERUNGANG	BIKA - BIKA HULU - JANGKANG	0° 52' 38.01" N	112° 50' 23.27" E
3	SUNGAI BALON	BIKA - BIKA HULU	0° 49' 59.51" N	112° 50' 10.91" E
4	JALAN RAYA UJUNG TANJUNG - EMPADE	BIKA - BIKA HULU	0° 49' 29.34" N	112° 49' 55.92" E
5	SUNGAI KERANJI	BIKA - BIKA HULU	0° 48' 57.63" N	112° 49' 52.77" E
6	SUNGAI MENYAPAK	BIKA - BIKA HULU	0° 47' 53.93" N	112° 49' 41.91" E
7	500 M SEBELUM JALAN TANI	BIKA - BIKA HULU	0° 47' 26.71" N	112° 50' 23.88" E
8	BATAS 4 DESA	BIKA - BIKA HULU - JELEMUK - JONGKONG MANDAY	0° 46' 19.42" N	112° 49' 37.64" E
9	UJUNG D. KETUTUNG SENIK	BIKA - JELEMUK	0° 46' 39.23" N	112° 48' 6.89" E
10	ULAK KETUTUNG	BIKA - JELEMUK	0° 46' 39.04" N	112° 47' 51.21" E
11	NANGA MUDIN	BIKA - NANGA MANDAY	0° 47' 15.86" N	112° 47' 45.44" E



1	2	3	4	5
12	TUGU BATAS	BIKA - NANGA MANDAY	0° 47' 48.43" N	112° 47' 51.61" E
13	SUNGAI LIPAI	BIKA - NANGA MANDAY	0° 47' 59.84" N	112° 47' 53.77" E
14	KAYU RENGAS	BIKA - NANGA MANDAY	0° 48' 35.99" N	112° 47' 11.65" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR